



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2020**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP BAPPEDA 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (RENJA) 2020 yang telah disusun. LKIP Tahun 2020 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2020, dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi turut mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah termasuk Kinerja Bappeda dalam penyerapan, *refocusing* anggaran dan rencana pelaksanaan program / kegiatan. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 guna mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

Penyusunan LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

Biak, Februari 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

Wilson J. Titahena, S.Pi.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700908 199603 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari Program/Kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan demikian perlu komitmen yang kuat agar di tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berkesinambungan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
a. Kedudukan	4
b. Tugas Bappeda	4
c. Fungsi.....	4
3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi	5
a. Susunan Organisasi	5
1. Kepala Badan.....	5
2. Sekretariat.....	5
3. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;	5
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;.....	5
5. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah;.....	5
6. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;	5
b. Tata Kerja.....	7
4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	14
a. Kepegawaian.....	14
b. Sarana dan Prasarana	15
c. Anggaran.....	16
5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor	16
6. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	19
1. Visi	19
2. Misi.....	19
3. Tujuan	20

4. Sasaran	20
5. Strategi	20
6. Kebijakan, Program dan Kegiatan	20
a. Kebijakan	20
b. Program dan Kegiatan	21
2. Rencana Kinerja Program	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	34
3.1.1 Indikator Kinerja	35
3.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	35
3.2 Akuntabilitas	56
3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum.....	58
 BAB IV PENUTUP	60



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi - misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan *update* terhadap perkembangan dunia saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan padanya, yang merujuk pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Pemerintah melalui kementerian yang berwenang.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda yang dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Bappeda

Bappeda Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; penyelenggaraan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
6. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

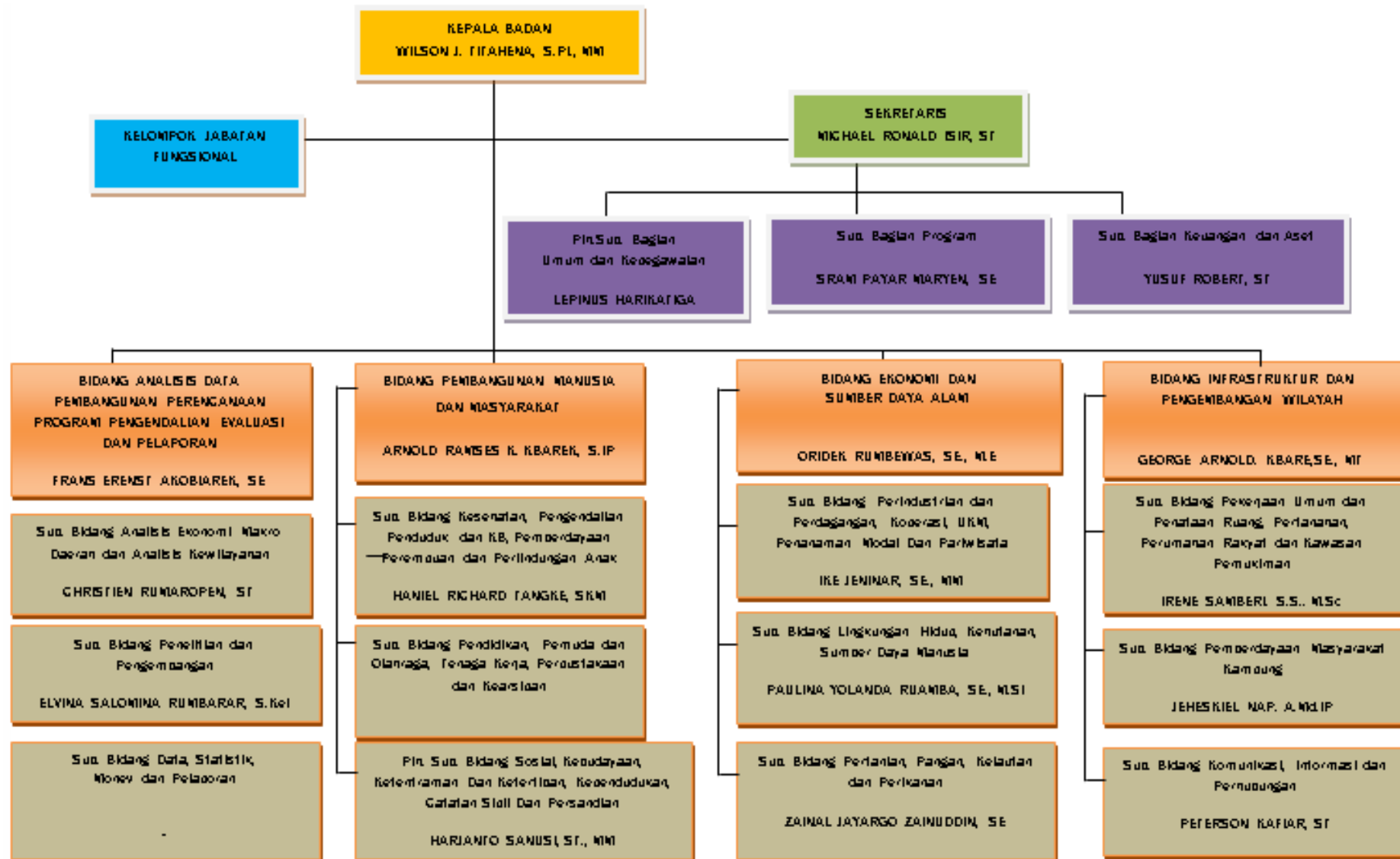
3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;
3. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
5. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah;
6. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bappeda Biak Numfor



b. Tata Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
2. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
4. Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
5. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dirinci sebagai berikut :

1). Kepala

- a). Kepala Bappeda mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan.
- b). Kepala Bappeda mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

2). Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a). Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b). Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c). Pengookordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d). Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e). Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Badan;
- f). Penyusunan Program Badan;
- g). Penatausahaan urusan umum ;
- h). Penatausahaan kepegawaian;
- i). Penatausahaan Keuangan; dan
- j). Pengelolaan inventaris Badan

3). Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu tugas-tugas membantu tugas-tugas badan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan, Penelitian dan Pengembangan serta Data Statistik Monev dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah di bidang Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pembangunan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;
- c) Pnganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;
- d) Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbanan sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- e) Penyusunan perencanaan program pembangunan dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang penelitian dan pengembangan;
- g) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penelitian dan pembangunan menyusun lapporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Sosial Budaya, dan Pemerintahan;
- j) Pengkoordinasian pembangunan di bidang Pendidikan, Inovasi dan Teknologi;
- k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah di bidang Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan;

- l) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian pembangunan daerah dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - m) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidangng Sosial Budaya;
 - n) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam ranngka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah;
 - o) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - p) Menyajikan dan mengamankan data imformasi pembangunan daerah; dan
 - q) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4). Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda Olahraga, tenaga kerja, Perpustakaan, Kebersihan serta urusan Sosial, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Kependudukan dan Catatan Sipil dan Persandian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya bidang pembangunan manusia mempunyai fungsi :
- a) Mengkordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
 - d) Penganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;

- e) Pengoptimalan peran dan fungsi pembangunan manusia dan masyarakat sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
- f) Penyusunan perencanaan program pembangunan manusia dan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat;
- g) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- h) Pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- i) Pengkoordinasian perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
- k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial, Kebudayaan, Trantib BUN Linmas, Adminduk;
- m) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Manusia dan Masyarakat, unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial Budaya;
- o) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
- p) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

5). Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, sumber daya manusia, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d) Penyusunan perencanaan Program pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
- h) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan;

- i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

6). Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Komunikasi, Informasi dan Perhubungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e) Penyusunan perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah;
- h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman;
- i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tranmigrasi;
- j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

a. Kepegawaian

Bappeda didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Kaban, yang mayoritas berpendidikan S1 serta memiliki ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jenis kelamin : 5 orang perempuan dan 32 orang laki-laki.

b. Berdasarkan pendidikan :

- Tamat S2 : 8 orang
- Tamat S1 : 19 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- Tamat SLTA : 7 orang
- Tamat SLTP : 1 orang

c. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV b : 1 orang
- Golongan IV a : 1 orang
- Golongan III d : 6 orang
- Golongan III c : 8 orang
- Golongan III b : 9 orang
- Golongan III a : 6 orang
- Golongan II d : 1 orang
- Golongan II c : 1 orang
- Golongan II b : 5 orang
- Golongan I d : 1 orang

d. Berdasarkan formasi jabatan struktural yang ada, belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan nomenklatur tentang perubahan OPD.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 30 unit dengan 10 unit dalam kondisi rusak berat dan 20 unit roda 2 (dua) dalam kondisi baik dan kepemilikan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 8 unit, 6 unit dalam kondisi baik dan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak berat. Bappeda Biak Numfor menempati gedung berlantai 2 (dua) yang representative untuk dapat menampung 44 orang pegawai, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

c. Anggaran

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Biak Numfor dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Belanja Tidak Langsung Rp. 5.245.814.215,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.784.210.000,- terdiri dari 14 (empat belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a). perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b). penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c). pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e). pelaksanaan kebijakan dan koordinasi terkait dengan penelitian dan pengembangan;
- f). pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g). pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Biak Numfor menghadapi permasalahan, yaitu :

1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan belum memadainya kompetensi perencanaan.

2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana belum optimal.
3. Perubahan lingkungan strategis.
4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan daerah.
5. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.
6. Angka kemiskinan yang masih besar.
7. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor.

Permasalahan yang dihadapi tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor maupun Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor, capaian Standar Pelayanan Minimal. Untuk tantangan Bappeda ke depan adalah meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, perubahan paradigma adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang pesat, memanfaatkan terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak lain, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengoptimalkan SDM yang tersedia, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang terbatas, dan meningkatkan kemampuan SDM.

6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra telah melalui beberapa tahapan koordinasi baik di tingkat internal Bappeda maupun koordinasi bersama Tim di Lingkup Kabupaten Biak Numfor.

Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Bappeda Kabupaten Biak Numfor di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

1. Visi

“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan kemandirian “

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran, Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan

5. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumber alam
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang masyarakat dan manusia
- d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan

6. Kebijakan, Program dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi sumberdaya manusia, sarana prasarana, dana dan metode kinerja.

2) Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Meningkatkan eksistensi Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan LKIP

5) Program Pengembangan Data/Informasi

- Pengumpulan, Up-Dating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Pengembangan Sistem Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah

6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor

7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan Rancangan RPJPD
- Penyusunan Rancangan RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Monitoring Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang statistik Pengendalian dan Evaluasi
- Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah
- Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah

8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- PDRB Menurut Wilayah

9) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Penyusunan Master Plan Pendidikan
- Kajian Pemanfaatan Dana OTSUS terhadap bidang pendidikan di Distrik

10) Program Pengendalian Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Pemantapan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

11) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS) RTRW
- Penunjang Raperda Revisi RTRW

12) Program Perencanaan Tata Ruang

- Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah terpadu di Kepulauan Padaido

13) Program Perencanaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

- Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (Otsus)

14) Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus

- Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)
- Publikasi Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus) Kepada Masyarakat.

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan arah kebijakan kabupaten Biak Numfor dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program/kegiatan serta anggaran dan sumber pendanaan.

Bappeda Biak Numfor telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dibuat antara Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Biak Numfor, sebagaimana berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.



PIHAK KEDUA

HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Biak, Maret 2020

PIHAK PERTAMA

Pt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak
 Numfor
 Tahun : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tesedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka"	1 Dokumen	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	154.000.000
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tersedianya Buku "PDRB"	1 Dokumen		
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Data Statistik pembangunan daerah yang terpublikasi	1 Dokumen		
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJPD/RTRW/RPJMD/RKPD)	82 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.236.000.000
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan OPD (RENSTRA/RENJA OPD)	60 Dokumen		
6	Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin	Persentase jabatan fungsional perencana yang berkualitas	persen	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	412.000.000
7	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi program dan kegiatan URD terhadap RD	91 Persen	Program perencanaan pembangunan daerah (Program perencanaan penggunaan dana otonomi khusus)	309.000.000
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program	Cakupan Ketersediaan data perencanaan program prioritas	88 Persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
	serta kegiatan pembangunan daerah	Otonomi Khusus Papua			
9	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Keberhasilan Program Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen(80%)	91 Persen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Program monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus)	515.000.000
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Cakupan laporan dan publikasi program otonomi khusus	88 Persen		
11	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Cakupan data ketercapaian perencanaan bidang ekonomi	58 Persen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	154.000.000
12	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi	2 Dokumen		
13	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Cakupan data ketercapaian perencanaan bidang sosial budaya	82 Persen	Program Perencanaan Sosial Budaya	154.000.000
14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Cakupan data ketercapaian perencanaan bidang prasarana wilayah	85 Persen	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	154.000.000
15	Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	61,6 Persen	Program Perencanaan	515.000.000
16	Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	Penetapan perda wilayah strategis	88 Persen	Program Perencanaan Pengembangan	917.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
17	Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten	Persentase Implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
18	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Dokumen harga analisa satuan harga ke-PU-an	Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	206.000.000
19	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Dokumen Perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke PU-an	Dokumen		
20	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Ketersediaan data pembangunan yang up to date dan terintegrasi	79 Persen	Program Pengembangan data/informasi	412.000.000
21	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Persentase Tingkat penggunaan data informasi untuk perencanaan pembangunan kampung	28 Persen		
TOTAL ANGGARAN INDIKATOR STRATEGIS					4.932.000.000

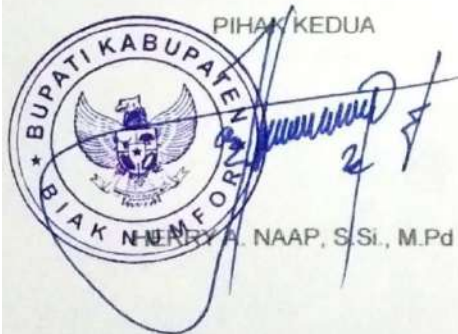
Jumlah anggaran untuk keseluruhan program, baik program utama dan program pendukung (rutin) adalah :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.945.231.000,00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.000.000,00	DAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan Operasional	170.000.000,00	DAU
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	240.100.000,00	DAU
5	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	DAU
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.000.000,00	DAU
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.700.000,00	DAU
8	Penyediaan makanan dan minuman	144.000.000,00	DAU
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	832.750.000,00	DAU
10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	76.800.000,00	DAU
11	Penyediaan administrasi pengelolaan keuangan daerah	33.881.000,00	DAU
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	261.325.000,00	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	DAU
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	72.000.000,00	DAU
3	Pengadaan mebeleur	34.325.000,00	DAU
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	DAU
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	85.000.000,00	DAU
C	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	398.950.000,00	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000,00	DAU
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	318.950.000,00	DAU
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	DAU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
2	Penyusunan LAKIP	15.000.000,00	DAU
E	Program Pengembangan data/informasi	800.000.000,00	
1	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	200.000.000,00	DAU
2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	200.000.000,00	DAU
3	Pengembangan sistem perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah	400.000.000,00	DAU
F	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	150.000.000,00	
1	Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kab. Biak Numfor	150.000.000,00	DAU
G	Program perencanaan pembangunan daerah	1.875.000.000,00	
1	Penyusunan rancangan RPJPD	350.000.000,00	DAU
2	Penyusunan rancangan RKPD	300.000.000,00	DAU
3	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	500.000.000,00	DAU
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	300.000.000,00	DAU
5	Koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi	275.000.000,00	DAU
6	Verifikasi usulan program/kegiatan pembangunan daerah	150.000.000,00	DAU
H	Program perencanaan pembangunan ekonomi	575.000.000,00	
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	275.000.000,00	DAU
2	PDRB Menurut Wilayah	300.000.000,00	DAU
I	Program perencanaan sosial budaya	1.704.509.044,00	
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	525.000.000,00	DAU
2	Penyusunan master plan pendidikan	800.000.000,00	DAU
3	Kajian pemanfaatan dana otsus terhadap bidang pendidikan di distrik	379.509.044,00	DAU
J	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	275.000.000,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Pemantapan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	275.000.000,00	DAU
K	Program Perencanaan Tata Ruang	1.000.000.000,00	
1	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosila (KLHS) RTRW	500.000.000,00	DAU
2	Penunjang raperda revisi RTRW	500.000.000,00	DAU
L	Program Perencanaan Pembangunan Dana Otsus	358.000.000,00	
1	Koordinasi penyusunan dan pembahasan URD Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (Otsus)	358.000.000,00	OTSUS
M	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus	242.000.000,00	
1	Monitoring reguler dan monitoring terpadu /kolaborasi pelaksanaan program/ kegiatan Otonomi Khusus delapan puluh persen (80%) bagian Kab.Kota	19v2.000.000,00	OTSUS
2	Publikasi hasil-hasil pelaksanaan prog/kegiatan otonomi khusus delapan puluh persen (80%) bag. Kab Kota kepada masrakat	50.000.000,00	OTSUS
	Total	9.625.015.044,00	

PIHAK KEDUA



HERY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Biak, Maret 2020

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor



WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

3. Rencana Kinerja Program

Rencana Kinerja Program Tahun 2020 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Rencana Kinerja Bappeda merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 dengan memperhatikan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Program/ Kegiatan Bappeda Biak Numfor Tahun 2020

No	Uraian	Lokasi Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
	Belanja Tidak Langsung		5.245.814.215,00
	Belanja Langsung		5.784.210.000,00
I	Program Pelayanan Administrasi Perantoran		1.943.950.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		126.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		170.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		263.900.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		200.000.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		102.000.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		14.700.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		228.000.000,00
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		757.550.000,00
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		76.800.000,00
11	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah		0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		169.325.000,00
12	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		0
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0
14	Pengadaan Mebeleur		34.325.000,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		50.000.000,00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		85.000.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		0

	Aparatur		
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal		0
18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur		0
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		40.000.000,00
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000,00
20	Penyusunan LAKIP		15.000.000,00
IV	Program Pengembangan Data/Informasi		400.000.000,00
21	Pengumpulan, Up-Dating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan		0
22	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		200.000.000,00
23	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah		200.000.000,00
VI	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		125.000.000,00
24	Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor		125.000.000,00
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1.422.150.000,00
25	Penyusunan Rancangan RPJPD		0
26	Penyusunan Rancangan RKPD		197.150.000,00
27	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		500.000.000,00
28	Monitoring Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		200.000.000,00
29	Koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang statistik Pengendalian dan Evaluasi		175.000.000,00
30	Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah		150.000.000,00
31	Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah		200.000.000,00
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		225.000.000,00

32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		225.000.000,00
33	PDRB Menurut Wilayah		0
IX	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		333.785.000,00
34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		333.785.000,00
35	Penyusunan Master Plan Pendidikan		0
36	Kajian Pemanfaatan Dana OTSUS terhadap bidang pendidikan di Distrik		0
X	Program Pengendalian Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		225.000.000,00
37	Pemantapan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		225.000.000,00
XI	Program Perencanaan Tata Ruang		300.000.000,00
38	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS) RTRW		0
39	Penunjang Raperda Revisi RTRW		300.000.000,00
XII	Program Pemanfaatan Tata Ruang		0
40	Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah terpadu di Kepulauan Padaido		0
XIII	Program Perencanaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus		350.000.000,00
41	Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (Otsus)		350.000.000,00
XIV	Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus		205.550.000,00
42	Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)		145.000.000,00
43	Publikasi Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus) Kepada Masyarakat.		60.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian Sasaran dan tolok ukur kinerja Program/kegiatan selama tahun 2020.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui gambaran tentang Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan perbandingan antara Rencana Kinerja Bappeda Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi program dan kegiatan.

Pengukuran tingkat Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, sedangkan hasil Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Kemudian hasil Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan tersebut dievaluasi agar mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 80 – 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil(*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan menjadi:

- a) Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b) Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e) Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator capaian kinerja yang akan dievaluasi dalam laporan ini adalah indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Terlaksananya jasa surat menyurat	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100%	100%	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.700.900,00	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	79,13%	100%	100%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	157.841.100,00	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	92,85	100%	100%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	250.500.000,00	Tersedianya tenaga honorer	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	94,92%	100%	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	155.789.000,00	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	77,89%	100%	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.733.850,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	53,66%	100%	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.350.000,00	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	50,00%	100%	100%
8	Penyediaan makan dan minum	144.000.000,00	Tersedianya makan minum bagi aparat	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	43,73%	65%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	571.747.400,00	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi antara Bappeda dengan lembaga lain	75,47%	100 %	100%
10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.553.300,00	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	94,47%	100 %	100%
11	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Tersedianya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik	0%	0%	0%
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Operasional Kantor yang baik	0%	0%	0%
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	0%	0%	0%
14	Pengadaan Mebeleur	-	Terlaksananya Pengadaan Sarana penunjang Kantor	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai	0%	0%	0%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100 %	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85.000.000,00	Terlaksananya jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	100%	100 %	100%
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Tersedianya Aparatur yang berkompeten	Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	0%	0%
18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	-	Tersedianya Aparatur yang berkompeten	Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	0%	0%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.280.000,00	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	37,12%	100 %	100%
20	Penyusunan LAKIP	15.000.000,00	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan LAKIP	100%	100 %	100%
21	Pengumpulan, Up Daring dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	-	Terlaksananya pemutakhiran data pembangunan	Tersedianya data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan	0%	0%	0%
22	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	140.375.000,00	Terlaksananya Penyusunan Buku IPM dan PDRB	Tersedianya data indikator IPM dan PDRB sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan	70,19%	85 %	93%
23	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah	200.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Terintegrasinya Sistem Informasi Perencanaan Daerah berbasis IT	100%	100 %	100%
24	Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor	-	Terlaksananya peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengembangan wilayah di kabupaten biak numfor	Meningkatnya infrastruktur perkotaan dan pengembangan wilayah kabupaten Biak Numfor	0,00%	0%	0%
25	Penyusunan Rancangan RPJPD	-	Terlaksananya Penyusunan RPJPD	Tersedianya Dokumen RPJPD	0%	0%	0%
26	Penyusunan RKPD	180.500.000,00	Terlaksananya Penyusunan RKPD TA	Tersedianya Dokumen RKPD TA 2021	91,55%	100 %	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
			2021				
27	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	221.824.900,00	Terlaksananya musrenbang RKPD 2020	Tersusunnya RKPD yang sinergis dan berkelanjutan dengan program dan kebijakan perencanaan nasional	44,36%	100 %	100%
28	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	Terlaksananya kegiatan monitoring program dan kegiatan tahun 2020	Tersedianya data presentase efisiensi kinerja OPD tahun 2020	0,00%	0%	0%
29	Koordinasi pemantapan perencanaan bidang statistic pengendalian dan evaluasi	75.497.100,00	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan pemantapan perencanaan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang statistik, pengendalian dan evaluasi	43,13	76 %	76%
30	Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Usulan Program /Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen yang akuntabel dan berkualitas	100%	100 %	100%
31	Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah	197.200.000,00	Terlaksananya Kegiatan Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel	98,60%	100 %	100%
32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	224.458.200,00	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Ekonomi	99,76	100 %	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
33	PDRB Menurut Wilayah	-	Terlaksannnya a penyusunan Dokumen PDRB Menurut Wilayah	Tersedianya data indikator PDRB menurut wilayah sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan	0%	0%	0%
34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	215.325.600,00	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Budaya	Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang sosial budaya	64,51%	85 %	92%
35	Penyusunan Master Plan Pendidikan	-	Terlaksananya a penyusunan Master Plan Pendidikan di Biak Numfor	Tersedianya Dokumen Master Plan Pendidikan Biak Numfor	0%	0%	0%
36	Kajian Pemanfaatan Dana OTSUS Terhadap bidang pendidikan di Distrik	-	Jumlah Kajian	Sinergitas Dokumen Perencanaan Kependidikan	0%	0%	0%
37	Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	160.349.000,00	Terlaksananya a Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya koodinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	71,27%	100 %	100%
38	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS) RTRW	-	Terlaksananya a Penyusunan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten	Tersedianya dokumen Dokumen KLHS RTRW Kabupaten	0%	0%	0%
39	Penunjang Raperda Revisi RTRW	183.248.800,00	Terlaksananya a Penunjang Raperda Revisi RTRW	Tersedianya Penunjang Raperda Revisi RTRW	81,08%	100 %	100%
40	Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah Terpadu di	-	Terlaksananya a Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan	Tersedianya Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah Terpadu	0%	0%	0%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
	Kepulauan Padaido (PWT)		n Wilayah Terpadu di Kepulauan Padaido (PWT)	di Kepulauan Padaido (PWT)			
41	Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	272.845.800,00	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	69,17%	84 %	100%
42	Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)	-	Terlaksananya Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)	Tersedianya Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)	0%	0%	0%
43	Publikasi Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen (80%) Bag. Kab. Kota Kepada Masyarakat	-	Terlaksananya publikasi hasil - hasil pelaksanaan OTSUS Kabupaten/ Kota Kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen publikasi hasil-hasil pelaksanaan OTSUS Kabupaten/ Kota Kepada Masyarakat	0%	0%	0%

Dari uraian pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa *Evaluasi Capaian Indikator Kinerja* dari masing–masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun anggaran 2020 dalam Program Pelayanan administrasi perkantoran terdapat 11 (sebelas) kegiatan, 10 (sepuluh) diantaranya tidak mencapai target realisasi keuangan, namun target fisik telah maksimal dilaksanakan.

Adapun dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dimaksud, sbb ;

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangannya mencapai 79.13%
- b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi keuangan 92.85%
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, realisasi keuangan 94,92%
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi keuangan 77,89%
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi keuangan 53,66%
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi keuangan 50,00%
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi keuangan 43,73%
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi keuangan 75,47%
- i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi keuangan 94,47%
- j. Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0 %

Berdasarkan kondisi dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian fisik yang tidak mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya mencapai 78%. Hal ini menggambarkan perlu adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan tahun 2021 guna menunjang pelayanan Kinerja administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aktifitas kesekretariatan Bappeda Kab.Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	100%
Keluaran: Terlaksananya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik	12 bulan	12 bulan	100%

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aktifitas kesekretariatan Bappeda Kab.Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 126.000.000,-	Rp. 99.700.000,-	79,13%
Keluaran: Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Operasional Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 170.000.000,-	Rp. 157.841.100,-	92,85%
Keluaran: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Roda 4 2 unit Roda 2 5 unit BBM 5.430 ltr	Roda 4 2 unit Roda 2 5 unit BBM 5.430 ltr	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik.	Roda 4 2 unit Roda 2 5 unit BBM 5.430 ltr	Roda 4 2 unit Roda 2 5 unit BBM 5.430 ltr	100%

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 263.900.000,-	Rp.250.500.000,-	94,92%
Keluaran:Tersedianya tenaga honorer/tenaga harian	12 orang	12 orang	100%

Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 orang	12 orang	100%
---	----------	----------	------

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : tersedianya Alat Tulis Kantor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 155.789.000,-	77,89 %
Keluaran: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan Penatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 102.000.000,-	Rp. 54.733.850,-	53,66%
Keluaran: Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan Penatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

7) Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 14.700.000,-	Rp. 7.350.000,-	50,00%
Keluaran: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan penatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	12 bulan	12 bulan	100%

8) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 228.000.000,-	Rp. 144.000.000	43,73 %
Keluaran: Tersedianya makan minum bagi aparatur	45 pegawai	45 pegawai	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan penatausahaan dan administrasi kepegawaian yang baik.	45 pegawai	45 pegawai	100%

9) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 757.550.000,-	Rp. 571.747.400,-	75,47 %
Keluaran: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	13 orang		100%
Hasil yang dicapai: Meningkatnya koordinasi antara bappeda dengan lembaga lain	13 orang		100%

10)Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya asset pemerintah			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 76.800.000	Rp. 72.553.300.-	94,47%
Keluaran: Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan	Ruang, gedung dan halaman	Ruang, gedung dan halaman	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan penatausahaan dan administrasi kepegawaian Bappeda yang baik.	Ruang, gedung dan halaman	Ruang, gedung dan halaman	100%

11) Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya	12 bulan	12 bulan	0%

Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik			
--	--	--	--

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdapat 5 (lima) kegiatan 2 (dua) kegiatan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Keluaran: Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 %
Hasil yang dicapai: Terwujudnya Operasional Kantor yang baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 %

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pemeliharaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%

3) Pengadaan Meubeleur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp. 34.325.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya pengadaan sarana Penunjang Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100%
Keluaran: Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp. 85.000.000,-	Rp. 85.000.000,-	100 %
Keluaran: Terlaksananya jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	110 Unit	110 Unit	100 %
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	110 Unit	110 Unit	100 %

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan realisasi fisik dan keuangan 0%.

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Tersedianya Aparatur Sumber Daya Manusia yang berkompeten	12 bulan	12 bulan	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana	12 bulan	12 bulan	0%

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Keluaran: Tersedianya Aparatur Sumber Daya Manusia yang berkompeten	12 bulan	12 bulan	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana	12 bulan	12 bulan	0%

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan Kegiatan penyusunan LKIP telah

dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%.

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.25.000.000,-	Rp.9.280.000,-	37,12%
Keluaran: Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	12 bulan	100%

2) Penyusunan LKIP

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.15.000.000,-	Rp. 15.000.000	100%
Keluaran: Terlaksananya penyusunan laporan Kinerja instansi pemerintah	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya laporan kinerja instansi pemerintah	12 bulan	12 bulan	100%

E. Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2020 total realisasi anggaran dan fisik mencapai 85%.

1) Pengumpulan, Up-Dating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	0%
Keluaran: Terlaksananya pemutakhiran data pembangunan			0%
Hasil yang dicapai: Tersedianya data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan			0%

2) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 140.375.000,-	70,19%
Keluaran: Terlaksananya penyusunan buku IPM dan PDRB 2020	50 Buku/CD	50 Buku/CD	93%

Hasil yang dicapai: Tersedianya data indikator IPM dan PDRB sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan	50 Buku/CD	50 Buku/CD	93%
--	------------	------------	-----

3) Pengembangan Sistem Perencanaan dan Informasi Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	100%
Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Terintegrasinya Sistem Informasi Perencanaan Daerah berbasis IT	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

F. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Guna melaksanakan program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh telah dialokasikan dana sebesar Rp. 125.000.000,- untuk 1 (satu) kegiatan yakni *Kegiatan penunjang peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor dengan nilai Rp. 125.000.000,- tidak terealisasi anggarannya.*

1) Kegiatan Penunjang Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 125.000.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor	1 kegiatan	1 kegiatan	0%
Hasil yang dicapai: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Biak Numfor	1 kegiatan	1 kegiatan	0%

F. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam program perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan total pagu dana Rp. 1.422.150.000,00,-. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 realisasi keuangan sebesar Rp. 825.022.000,- atau 58% dari pagu dana yang tersedia dan capaian realisasi

fisik sebesar 100% dari 5 (Lima) kegiatan. Sedangkan realisasi keuangan dan realisasi fisik 0% yakni kegiatan 1) penyusunan rancangan RPJPD dan, 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

1) Penyusunan Rancangan RPJPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya Penyusunan RPJPD	1 kegiatan	1 kegiatan	0%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen RPJPD	1 dokumen	1 dokumen	0%

2) Penyusunan RKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 197.150.000,-	Rp. 180.500.000,-	91,55
Keluaran: Terlaksananya Penyusunan RKPD TA 2021	19 distrik, 2 kali	19 distrik, 2 kali	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen RKPD TA 2021	1 dokumen	1 dokumen	100%

3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 500.000.000,-	Rp. 221.824.900,-	44,36%
Keluaran: Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2020	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Tersusunnya RKPD yang sinergis dan berkelanjutan dengan program dan kebijakan perencanaan nasional	1 dokumen	1 dokumen	100%

4) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Terlaksananya kegiatan monitoring program dan kegiatan tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	0%
Hasil yang dicapai: Tersedianya data persentase efisiensi kinerja OPD tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	0%

5) Koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Jumlah Dana	Rp. 175.000.000,-	Rp. 75.497.100,-	43,13
Keluaran: Jumlah koordinasi pemantapan perencanaan bidang statistik pengendalian dan evaluasi yang terlaksana	20 Kali	20 Kali	100%
Hasil yang dicapai: Adanya Sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi	20 Kali	20 Kali	100%

6) Verifikasi Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	100%
Keluaran: Jumlah verifikasi usulan program/kegiatan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Hasil yang dicapai: Perencanaan 1 tahun pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

7) Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 197.200.000,-	98,60%
Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Validasi dan Verifikasi Renstra Perangkat Daerah	36 Renstra PD	36 Renstra PD	100%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel	36 Renstra PD	36 Renstra PD	100%

G. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Guna melaksanakan program perencanaan pembangunan ekonomi telah dialokasikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- untuk 2 (Dua) kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi keuangan sebesar Rp. 224.458.200 atau 99,76% dengan realisasi fisik 100% dari 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan, sedangkan 1 (satu) kegiatan lainnya tidak terlaksana di tahun 2020 yakni kegiatan *penyusunan PDRB Wilayah*.

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 225.000.000,-	Rp. 224.458.200,-	99,76%
Keluaran: Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi yang terlaksana	28 kali	28 kali	100%
Hasil yang dicapai: Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	28 kali	28 kali	100%

2) PDRB Menurut Wilayah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah dokumen PDRB menurut wilayah yang tersusun	1 dokumen	0	0
Hasil yang dicapai: Tersedianya PDRB menurut Wilayah	1 dokumen	0	0

H. Program Perencanaan Sosial Budaya

Guna mendukung program perencanaan sosial dan budaya telah dialokasikan dana sebesar Rp. 333.785.000,- untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan 1). Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan realisasi anggaran sebesar 64,52% sedangkan 2). Penyusunan Master Plan Pendidikan dan 3). Kajian Pemanfaatan Dana OTSUS terhadap bidang Pendidikan di Distrik. dan sampai tahun anggaran 2020 berakhir realisasi anggaran dan fisik 0% dengan kata lain bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 333.785.000,-	Rp. 215.325.600,-	64,52%
Keluaran: Jumlah Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	29 kali	27 kegiatan	85 %
Operasional Pokja AMPL, Penunjang/Pendamping penurunan Stunting	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	
Hasil yang dicapai: Tersedianya Data Untuk Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	92%

2) Penyusunan Master Plan Pendidikan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 75.000.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah rancangan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
Hasil yang dicapai : Peningkatan perencanaan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

3) Kajian Pemanfaatan Dana OTSUS Terhadap Bidang Pendidikan di Distrik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang Sosial Budaya			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah Kajian	1 Dokumen	0 Dokumen	
Hasil yang dicapai: Sinergitas Dokumen Perencanaan Kependidikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

I. Program Pengendalian Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Guna mendukung program Pengendalian Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah dialokasikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- untuk membiayai 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan *pemantapan koordinasi bidang prasarana dan pengembangan wilayah* dan sampai tahun anggaran 2020 berakhir realisasi anggaran sebesar Rp. 160.349.000 dengan realisasi fisik 71%.

1) Pemantapan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 225.000.000,-	Rp. 160.349.000,-	71,26%
Keluaran: Jumlah Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah	12 kali	12 kali	100 %
Hasil yang dicapai: Tersinkronnya Perencanaan Pembangunan Bidang Praswil	12 bulan	12 bulan	100%

J. Program Perencanaan Tata Ruang

Dalam program perencanaan tata ruang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total pagu dana Rp. 300.000.000,-. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 realisasi keuangan sebesar Rp. 183.248.000,- atau 61% dari pagu dana yang tersedia. Sedangkan realisasi keuangan dan realisasi fisik 0% yakni kegiatan *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS) RTRW*.

1) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Sosial (KLHS) RTRW

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 500.000.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen	0 %
Hasil yang dicapai: Terintegrasinya KLHS RTRW terhadap produk RTRW Kabupaten Biak Numfor 2011-2031	100 %	0 %	0%

2) Penunjang Raperda Revisi RTRW

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor dan Masyarakat			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 183.248.800,-	81,08%
Keluaran: Jumlah raperda terevisi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Hasil yang dicapai: Terlaksananya Perda revisi RTRW Kabupaten Biak Numfor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

K. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Guna mendukung program Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah dialokasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk membiayai 1 (satu)

kegiatan namun telah mengalami refocussing anggaran sehingga kegiatan *Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah terpadu di Kepulauan Padaido* sampai tahun anggaran 2020 berakhir realisasi anggaran sebesar 0% dan fisik 0% artinya bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

1) Pemantapan Kawasan Prioritas Pembangunan Wilayah terpadu di Kepulauan Padaido.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah Kawasan Prioritas Pembangunan terpadu yang terlaksana	1 Lokasi	0 Lokasi	0 %
Hasil yang dicapai: meningkatkan prioritas perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah yang terarah dan berkelanjutan	100 %	0 %	0%

L. Program Perencanaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Guna mendukung Program Perencanaan, Penggunaan Dana Otonomi Khusus telah dialokasikan dana sebesar Rp. 394.450.000,- untuk pelaksanaan kegiatan *Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Otonomi Khusus Kabupaten*, yang sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi keuangan mencapai 69,17% begitu pula terhadap realisasi fisik yang mencapai 100%, hal ini dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

1) Koordinasi Penyusunan dan Pembahasan URD Penggunaan Otonomi Khusus Kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 394.450.000,-	Rp. 272.845.800,-	69,17%
Keluaran: Jumlah koordinasi yang terlaksana	3 kali	3 kali	100%
Hasil yang dicapai: Terkoordinirnya penyusunan dan Pembahasan URD Otsus	3 kali	3 kali	100%

M. Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Guna mendukung Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus telah dialokasikan dana sebesar Rp. 205.550.000,- untuk

pelaksanaan kegiatan Monitoring Reguler dan monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen Bagian Kabupaten/Kota dan kegiatan *Publikasi hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen (80%) Bag. Kabupaten Kota Kepada Masyarakat*, yang sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan dan fisik 0%, artinya bahwa kegiatan ini tidak terlaksana.

1) Monitoring Reguler dan monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen Bagian Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 145.550.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah Monitoring Terpadu	1 Frekuensi	0 %	0%
Hasil yang dicapai: Tersedianya Dokumen Monitoring Reguler dan Monitoring Terpadu/Kolaborasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Dua Puluh Persen, Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota (Otsus)	1 Frekuensi	0%	0%

2) Publikasi Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Otonomi Khusus Delapan Puluh Persen (80%) Bagian Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 60.000.000,-	Rp. 0,-	0%
Keluaran: Jumlah Publikasi Pembangunan	1 kali	0 kali	0%
Hasil yang dicapai: Terpublikasinya hasil pelaksanaan kegiatan otonomi khusus Daerah	100 %	0 %	0%

3.2 Akuntabilitas

Dalam Tahun Anggaran 2020, jumlah Dana yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 sebesar **Rp. 11.030.024.215,-** (*Sebelas Milyar Tiga Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*) yang terdiri dari:

a). Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.245.814.215,-**

b). Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.578.210.000,-**

Pada Pos belanja tidak langsung sampai dengan Desember 2020 telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.899.298.992,00,-** atau telah mencapai **93,39%**. Sedangkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, jumlah dana pembangunan belanja langsung yang telah direalisasikan sebesar **Rp.3.900.119.950,-** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau mencapai **67,43%**.

Bila prosentase realisasi keuangan dihitung secara rata-rata, maka prosentasi capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun Anggaran 2020 sebesar **79,78%** setelah rasionalisasi refocussing anggaran penanggulangan Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan Bappeda Biak Numfor tahun 2020 berada pada skala **CUKUP**.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan diatas, maka dapat dievaluasi ketercapaian indikator kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2020 kemudian dibandingkan dengan hasil kinerja pada tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Program	Tahun 2019		Persen (%)	Tahun 2020		Persen (%)
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belanja Tidak Langsung	1.368.360.000,00	1.020.000.000,00	74,54	977.620.000,00	924.850.000	94,60
2	Belanja Langsung	11.800.327.250,00	8.000.090.050,00	67,80	4.806.590.000,00	2.975.269.950,00	61,90
3	Total Pagu Anggaran	13.168.687.250,00	9.020.090.050,00	68,50	5.784.210.000	3.900.119.950	67,43

3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum

Faktor-faktor yang akan dinilai untuk mengukur Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum adalah:

a) Tingkat kehadiran pegawai

Jumlah hari kerja Staf Bappeda Kabupaten Biak Numfor dalam tahun anggaran 2020 sebanyak 248 hari kerja atau rata-rata 19,91 hari kerja per bulan dengan rata-rata tingkat kehadiran 35 pegawai Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Jika dibandingkan antara jumlah hari kerja per tahun dengan tingkat kehadiran pegawai Bappeda dalam tahun anggaran 2020, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran pegawai mencapai 87% atau berada pada skala *BAIK*.

b) Surat menyurat

Dalam tahun anggaran 2020, jumlah surat yang diterima oleh sekretariat Bappeda sebanyak 781 surat, sedangkan jumlah surat keluar sebanyak 603 lembar surat.

c) Analisa tingkat kebutuhan pegawai

Dalam rangka menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor di masa yang akan datang, perlu untuk diperhatikan tingkat kebutuhan pegawai, yaitu:

- i. Pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan sesuai bidang tugas;
- ii. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II bagi pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- iii. Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Daerah dan Luar Daerah.



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun dan selanjutnya diajukan kepada Bupati Biak Numfor dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Dari hasil analisa terhadap capaian kinerja, capaian sasaran, kinerja keuangan dan kinerja kepegawaian dan umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berada pada skala baik.

Beberapa hal yang dapat diusulkan melalui laporan ini adalah hal-hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kinerja aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah :

- 1). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program pendidikan dan latihan teknis perencanaan.
- 2). Penguatan kapasitas lembaga melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV bagi aparat perencana.
- 3). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program sosialisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dalam daerah dan luar daerah.

Terkait usulan di atas dipandang sangat penting mengingat beban kerja dan tanggung jawab dalam upaya menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas. Disadari pula bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena adanya berbagai kendala yang dijumpai selama penyusunan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2020, namun kiranya kendala tersebut menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja aparat Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Sumbang saran demi perbaikan dan penyempurnaan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2020 sangat kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Biak Numfor, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Staf Ahli Bupati Biak Numfor, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2020, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membalas budi baik bapak/ibu/saudara sekalian.

Kepada seluruh aparat perencana yang telah mendedikasikan potensi diri, membangun sinergitas dan loyalitas, serta tetap mempertahankan semangat “Satu Tim” disampaikan rasa bangga dan terima kasih.

Biak, Februari 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

Wilson J. Titahena, S.Pi.,MM

Pembina Tk. I
NIP. 19700908 199603 1 003